

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampaknya jika aparat tidak terbuka:

*“Terkadang kita bolak balik mengurus surat-surat yang diperlukan dan terkadang harapan kita tidak tercapai. Ya, kadang membuat kesal”*

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu aparat pelayanan tentang asimetri informasi antara sesama aparat pelayanan:

*“Terkadang ada informasi dari atas tidak sampai ke kita atau terkadang ada kesalahan informasi sehingga membingungkan”.*

Selanjutnya penulis menanyakan tentang dampaknya jika informasi tidak sampai dari atas atau terjadi kesalahan informasi:

*“Ya, bisa menyebabkan kesalahan dalam implementasi kebijakan atau pelayanan bisa terganggu, tidak berjalan dengan baik.”*

Selanjutnya penulis menanyakan, apakah menurut Anda Semakin tinggi *asymmetric information* (perbedaan informasi yang dimiliki oleh aparat pelayanan dengan informasi yang diketahui dan diterima oleh masyarakat) maka semakin rendah kualitas pelayanan organisasi kepada publik: *“ya, jelas. Makin tidak jelas informasi, makin simpangsiurnya informasi tentu pelayanan menjadi lama dan sudah”*

Selain itu, penulis meminta kepada penyedia barang ATK memberikan contoh tentang *asymmetric information berupa* perbedaan informasi yang diterima dengan yang disampaikan oleh aparat pelayanan. Penyedia ATK tersebut menceritakan bahwa:

*”Pernah setelah saya menyerahkan barang ATK kepada panitia pengadaan barang, langsung saya meminta bayarannya. Panitia pengadaan barang tersebut sampaikan datangnya 3 hari kemudian. Berdasarkan informasi tersebut, maka 3 hari kemudian saya datang tapi ternyata dananya belum*

*ada dan diberi tahu lagi bisa datang 3 hari kemudian sehingga setelah 3 hari saya datang lagi, ternyata belum bisa juga dibayarkan dengan alasan belum ada dana turun dari keuangan. Selanjutnya saya cek di keuangan ternyata dari keuangan menyatakan harus ada dulu laporan dari panitia pengadaan barang. Selanjutnya, saya sampaikan kepada panitia pengadaan barang lalu disampaikan silahkan ditunggu saja. Setelah saya 2 jam menunggu, juga belum selesai sehingga saya tanyakan lagi. Lalu panitia pengadaan barang menyatakan bahwa maksudnya ditunggu saja adalah ditunggu sampai selesai proses administrasinya baru bisa dibayarkan, jadi bukan berarti ditunggu sekarang uangnya. 1 minggu kemudian saya diminta datang terima uangnya. Waktu saya datang mau terima uangnya lalu diminta pulang dulu ambil stempel perusahaan sehingga saya pulang ambil stempel perusahaan kemudian kembali lagi ke kantor untuk menerima uangnya tapi ternyata yang pegang uangnya lagi keluar kantor sehingga besoknya saya datang lagi baru bisa diterima dananya. Ini informasinya tidak jelas sehingga tidak efisien.”*

Sebaliknya, penulis juga meminta kepada panitia pengadaan barang dan jasa memberikan contoh tentang *asymmetric information* yang pernah dialami dalam kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas. Panitia pengadaan barang dan jasa tersebut menceritakan bahwa:

*“Pernah ada mobil dinas tergores pada beberapa bagian permukaan sehingga saya diminta bawa ke bengkel untuk didico (dicat). Informasi dari bengkel bahwa selesai 6 hari kemudian. Setelah 6 hari saya datang mau mengambil tersebut, ternyata belum selesai yakni masih dalam proses dico. Alasannya bahwa masih ada yang duluan sehingga terlambat mulai dikerjakan. Selanjutnya, saya dijanji bahwa selesai 3 hari mendatang, sehingga saya datang setelah 3 hari. Mobil tersebut diambil dan diserahkan ke penanggungjawab pengguna mobil tersebut. Lalu penanggungjawab pengguna mobil tersebut menanyakan apakah sudah diganti kanvas koplengnya, Saya jawab tidak. Penanggung jawab pengguna mobil marah, pada hal tidak ada penyampaian sebelumnya bahwa sekaligus ganti juga kanvas koplengnya. Pada hari itu juga saya diminta lagi bawa ke bengkel tersebut untuk ganti kanvas kopleng dan 2 hari kemudian baru diambil.*

Dari uraian di atas menunjukkan adanya *asymmetric information* yang dapat mempengaruhi besarnya biaya transaksi.

#### **b. Perspektif Teori *Opportunity Behavior* dalam Menganalisis Biaya Transaksi**

*Opportunity behavior* adalah perilaku aparat pelayanan dalam mencari dan memanfaatkan peluang untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan meminimasi biaya transaksi (Webley (2005: 155), Traub, (2000: 122), Tversky (2004: 74) dan Tietz (2002: 163))

Untuk menganalisis biaya transaksi dengan menggunakan perspektif teori *Opportunity behavior*, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap salah satu penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas tentang ada perilaku aparat untuk memberikan pelayanan optimal dengan menekan biaya seminimal mungkin:

*“Pelayanan yang optimal kepada masyarakat biasa diusahakan dan dilaksanakan oleh aparat pemerintah, tapi meminimalkan biaya transaksi hanya retorika saja. Prosesnya bisa dibuat sederhana tapi transaksi tetap tinggi bahkan terkadang ada yang sengaja mempersulit ada alasan untuk mengenakan biaya atau bisa juga supaya ada fee. Sebagai pengusaha, jika ada untung yang kita peroleh kita ihlas mengeluarkan dan demi kelancaran pekerjaan dan kelanjutan kerja sama.”*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap salah satu aparat pelayanan tentang ada perilaku aparat untuk memberikan pelayanan optimal dengan menekan biaya seminimal mungkin:

*“Kita selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik, tapi kita juga mengharapkan honor atau insentif yang tinggi. Jika bisa honor nya tinggi untuk apa dikurangi.”*

Selanjutnya penulis menanyakan, apakah menurut Anda semakin tinggi *opportunity behavior* (perilaku aparat pelayanan dalam mencari dan memanfaatkan peluang untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan meminimasi biaya transaksi) maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik: “ya, benar”

Selain itu, penulis meminta kepada penyedia barang ATK memberikan contoh tentang *Opportunity behavior* yaitu perilaku aparat pelayanan dalam mencari dan memanfaatkan peluang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Penyedia barang ATK tersebut menceritakan bahwa:

*”Sebagai contoh pada saat saya meminta uang pembayaran atas ATK yang saya sudah serahkan, itu berbelit-belit dan tidak punya inisiatif untuk menghubungi kita pada saat lewat waktu janjinya sementara belum bisa dia penuhi. Kan sebaiknya diinformasikan kepada kita jika ingin memberikan pelayanan yang baik”.*

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari teori *Opportunity behavior* aparat (birokrasi) adalah masih adanya aparat yang tidak menggunakan kesempatan dengan baik untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

### **c. Perspektif Teori *efficiency economic value* dalam Menganalisis Biaya Transaksi**

*Efficiency economic value* adalah aktivitas yang dilakukan oleh aparat pelayanan dalam memberikan pelayanan dengan mempertimbangkan nilai secara ekonomis dari hasil pelayanan tersebut (Viscusi, WK. (2003: 79), Wittman, DA (2004: 246) dan Birl, Higgins (2003: 195)).

Untuk menganalisis biaya transaksi dengan menggunakan perspektif teori *efficiency economic value*, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap salah satu penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas tentang efisiensi nilai ekonomi yang dilakukan oleh aparat pelayanan:

Untuk menganalisis biaya transaksi dengan menggunakan perspektif teori *efficiency economic value*, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap

penyedia barang ATK dan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas tentang aktivitas efisiensi yang dilakukan oleh aparat pelayanan. Menurut penyedia barang ATK adalah:

*“Aparat pelayanan memang terkadang melakukan efisiensi dalam hal proses tapi dalam hal besarnya biaya transaksi saya kira tidak, Terkadang aparat membantu memperlancar karena ada harapan penyedia barang bisa ada pengertian untuk bisa memberikan sebagian keuntungan tapi tidak semua begitu karena ada juga yang memang betul-betul membantu kelancaran proses.*

Sedang menurut penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas adalah:

*“Aparat pelayanan memang seharusnya melakukan efisiensi biaya transaksi tapi nyatanya jarang ditemukan seperti itu. Jika ada uang pelicin urusan bisa lancar tapi jika tidak, maka urusan menjadi panjang dan berbelit-belit sehingga biaya menjadi besar. Aparat terkadang sengaja mengusahakan agar anggaran pelayanan menjadi tinggi supaya honor atau insentifnya tinggi. Jika aparat membantu kita mempercepat proses, ya kita juga perlu mengerti dari pada bolak balik kemana kemari sehingga biaya bisa menjadi lebih besar. Jadi sebaiknya kita saling membantu agar urusan cepat. Selain itu, ada juga sebagian kecil aparat pelayanan yang memang melayani masyarakat sebaik mungkin tanpa harus ada uang pelicin.”*

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap pejabat pengadaan barang/jasa tentang aktivitas yang dilakukan oleh aparat pelayanan dalam rangka melakukan efisiensi biaya transaksi dengan tetap mengusahakan agar hasilnya tetap menguntungkan secara ekonomi:

*“Ya, kita berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin, namun tidak dipungkiri bahwa terkadang kita mengharapkan adanya pengertian dari orang yang dilayani.”*

Selanjutnya penulis menanyakan, apakah menurut Anda semakin tinggi *efficiency economic value*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik: *“ya, benar”*

Selanjutnya penulis menanyakan, apakah menurut Anda semakin tinggi *efficiency economic value*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik: “*ya, benar*”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada kecenderungan biaya yang tinggi akan menyebabkan pelayanan berkualitas, atau pelayanan yang berkualitas diharapkan dibarengi dengan adanya insentif.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara kepada pejabat pengadaan barang/jasa pada tahun 2011 tentang efektivitas proses transaksi pengadaan ATK dan pemeliharaan kendaraan dinas dan efektivitas penggunaan anggaran:

*“Dalam proses pengadaan ATK dimana langsung disorder banyak barang, maka terkadang memang ada barang yang cepat habis sementara ada barang lain tersisa. Kendaraan dinas terkadang memang terlambat dilakukan perbaikan sehingga terkadang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, tapi hal itu dapat diatasi dengan menggunakan kendaraan lain. Dalam proses tersebut ada biaya yang kita keluarkan untuk seperti honorarium panitia diberikan kepada panitia yang memang bekerja, biaya transportasi diberikan kepada panitia yang menggunakan transportasi mengurus pemeliharaan kendaraan dinas seperti pergi ke bengkel, konsumsi diberikan pada waktu rapat atau bekerja. Jadi biaya transaksi yang dikeluarkan betul-betul digunakan untuk mengurus pemeliharaan kendaraan dinas..”*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terkadang proses pengadaan ATK dan pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai dengan harapan. Walaupun semua anggaran dipakai beli barang/jasa akan tetapi efektivitasnya belum optimal. Selanjutnya perlu diketahui besarnya biaya transaksi pengadaan ATK dan pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana pada uraian berikut.

### **1) Besarnya Biaya Transaksi Dalam Proses Pengadaan ATK**

Dalam kegiatan pengadaan ATK ada proses yang dilalui yang tentunya membutuhkan biaya. Merujuk pada Nearly, Jeremy (2003: 251),

Matthew (2005: 45), Norman, Davis (2004: 59) dan Murdock, James P. (2005: 69), maka biaya tersebut dibagi atas empat komponen yaitu biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya operasional.

Biaya informasi di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan informasi dalam transaksi pengadaan alat tulis kantor (ATK) pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011. Biaya Informasi ini terdiri atas biaya pulsa telepon/HP dan pulsa internet dalam mencari dan menyampaikan informasi dari atau kepada orang lain.

Biaya teknologi di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai sarana teknologi dalam transaksi pengadaan alat tulis kantor (ATK) pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011. Biaya teknologi terdiri atas biaya pesawat telepon/HP, Perangkat internet, Komputer dan printer. Biaya pesawat telepon/HP digunakan dalam membiayai pengadaan pesawat telepon/HP dalam rangka melakukan komunikasi. Biaya perangkat internet digunakan dalam membiayai perangkat internet yang digunakan dalam mencari dan menyampaikan informasi, memberikan pengumuman dan komunikasi lewat internet. Biaya komputer digunakan dalam membiayai pengadaan komputer yang digunakan untuk melakukan pengetikan surat/dokumen dan pencarian informasi serta komunikasi melalui internet. Biaya printer digunakan dalam membiayai pengadaan printer yang digunakan dalam rangka mencetak surat dan dokumen yang

terkait pengadaan ATK. Biaya administrasi di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan administrasi dalam transaksi pengadaan alat tulis kantor (ATK) pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011. Biaya administrasi tersebut terdiri atas biaya kertas, buku, map, materai, pulpen, tinta printer, bantal cap, amplop, heker, isi heker dan foto copy. Biaya buku dan kertas digunakan dalam membiayai pembelian buku dan kertas sebagai tempat melakukan pencatatan administrasi. Biaya alat tulis digunakan membiayai pembelian alat tulis yang digunakan dalam menulis pencatatan dan surat dalam administrasi. Biaya materai digunakan dalam membiayai pembelian materai untuk memperkuat legitimasi surat dan kuitansi. Biaya foto copy dan penjilidan digunakan dalam membiayai penggandaan surat-surat dan laporan.

Biaya operasional di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan operasional dalam pengadaan alat tulis kantor (ATK) pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011. Biaya operasional ini terdiri atas biaya honorarium, konsumsi, transportasi dan listrik. Biaya honorarium digunakan dalam membiayai honor tim yang terkait dengan pengadaan ATK yang melakukan perencanaan, penunjukan penyedia barang, penerimaan barang, pemeriksaan barang, pengarsipan dan pelaporan. Tim ini terdiri atas KPA, PPK, kepala, sekretaris dan staf pendukung. Biaya konsumsi digunakan dalam membiayai pembelian konsumsi dalam

bentuk makanan berat dan makanan ringan untuk tim pada saat melaksanakan kegiatan operasional seperti rapat. Biaya transportasi digunakan membiayai transportasi tim dalam melakukan survei calon penyedia barang, survei barang dan harga barang. Biaya listrik digunakan dalam membiayai energi listrik yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti listrik untuk perangkat komputer dan penerangan.

Berdasarkan uraian dalam proses pengadaan ATK pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa komponen biaya transaksi yang timbul dalam proses tersebut yaitu:

1. Biaya informasi seperti biaya pulsa telepon/HP dan pulsa internet
2. Biaya teknologi seperti biaya HP/pesawat telepon, komputer/laptop, printer dan perangkat lunak
3. Biaya administrasi seperti kertas, buku, map, pulpen, tinta printer, materai, bantal cap, amplop, heker, isi heker dan foto copy
4. Biaya operasional seperti biaya listrik, transportasi, konsumsi, dan honorarium pegawai.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang tentang perkiraan rincian biaya transaksi pengadaan ATK pada tahun 2011 yang terdiri atas biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya operasional. Selanjutnya, penulis menghitung besarnya biaya transaksi tersebut. Adapun hasilnya sebagaimana pada uraian berikut ini:

### 1. Biaya Informasi

Rincian besarnya biaya informasi terdiri atas biaya pulsa telpon, HP dan internet sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Biaya informasi pengadaan ATK

No	Komponen biaya	Volume	Biaya transaksi (Rp)
1	Biaya telepon	6 x Rp 2.000	12.000
2	Pulsa HP	25 x Rp 5.000	125.000
3	Jasa internet	5 x Rp 8.000	40.000
Jumlah			165.000

Sumber: Hasil wawancara kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang

### 2. Biaya Teknologi

Rincian besarnya biaya teknologi terdiri atas biaya HP/pesawat telepon, perangkat internet, komputer/laptop dan printer sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Biaya teknologi pengadaan ATK

No	Komponen biaya	Volume	Biaya transaksi (Rp)
1	Pesawat telepon	0,5 % x Rp 200.000	1.000
2	Pesawat HP	0,5 % x Rp 2.000.000	10.000
3	Perangkat internet	0,05 % x Rp 4.000.000	2.000
4	Komputer/Laptop	0,5 % x Rp 3.000.000	15.000
5	Printer	1 % x Rp 1.000.000	10.000
Jumlah			38.000

Sumber: Hasil wawancara kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang

### 3. Biaya Administrasi

Rincian besarnya biaya administrasi terdiri atas biaya kertas, buku, map, alat tulis, tinta printer, amplop, bantal cap, heker, isi heker, materai, dan foto copy sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Biaya administrasi pengadaan ATK

No	Komponen biaya	Volume	Biaya transaksi (Rp)
1	Buku	2 x Rp 15.000	30.000
2	Kertas	2 rim x Rp 45.000	90.000
3	Alat tulis	1 paket	30.000
4	Tinta printer	1 paket	50.000
5	Amplop	1 paket	20.000
6	Bantal cap	1 buah x Rp 5.000	5.000
7	Hekter dan isinya	1 paket	10.000
8	Materai	7 x Rp 7.000	49.000
9	Foto copy	1 paket	100.000
Jumlah			384.000

Sumber: Hasil wawancara kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang

### 4. Biaya Operasional

Rincian besarnya biaya operasional terdiri atas biaya honorarium, konsumsi, transportasi dan listrik sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Biaya operasional pengadaan ATK

No	Komponen biaya	Volume	Biaya transaksi (Rp)
1	Honor KPA	1 orang	960.000
2	Honor PPK	1 orang	900.000
3	Honor Kepala	1 orang	900.000
4	Honor Sekretaris	1 orang	720.000
5	Honor Staf pendukung	1 orang	600.000
6	Konsumsi makanan besar	20 orang x Rp 20.000	200.000
7	Konsumsi makanan kecil	10 orang x Rp 8000	160.000
8	Transportasi	5 kali x Rp 40.000	200.000
9	Listrik	1 paket	340.000
Jumlah			4.980.000

Sumber: Hasil wawancara kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah dari setiap komponen biaya transaksi, maka disusunlah rekapitulasi biaya transaksi pengadaan ATK pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Rekapitulasi biaya transaksi pengadaan ATK

No	Komponen biaya	Biaya transaksi (Rp)
1	Biaya informasi	165.000
2	Biaya teknologi	38.000
3	Biaya administrasi	384.000
4	Biaya operasional	4.980.000
Total		5.567.000

Berdasarkan rekapitulasi jumlah biaya transaksi berdasarkan komponen biaya transaksi di atas, maka dihitunglah rasio komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi dengan menggunakan rumus:

$$RBT_i = \frac{BT_i}{TBT}$$

Dimana:

RBT<sub>i</sub> = Rasio biaya transaksi komponen ke-i terhadap total biaya transaksi

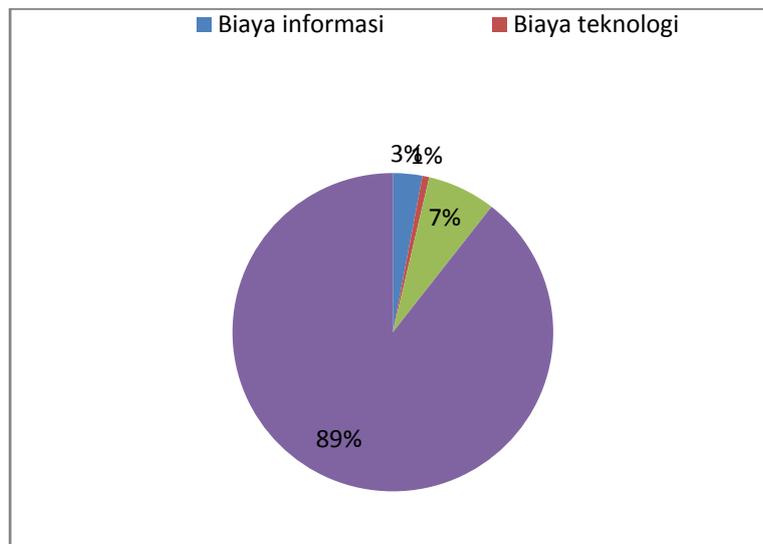
BT<sub>i</sub> = jumlah biaya transaksi komponen ke-i

TBT = Total biaya transaksi

Tabel 4.6 Rasio komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi

No	Komponen biaya	Biaya transaksi (Rp)	Rasio		
1	Biaya informasi	165.000	0,03	Atau	2,96
2	Biaya teknologi	38.000	0,01	Atau	0,68
3	Biaya administrasi	384.000	0,07	Atau	6,90
4	Biaya operasional	4.980.000	0,89	Atau	89,46
Total		5.567.000	1,00	Atau	100,00

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1 Rasio komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi pengadaan ATK (Sumber: Hasil perhitungan rasio pada tabel 4.6)

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa biaya dan rasio terbesar dari ke empat komponen biaya transaksi tersebut adalah biaya operasional sedang yang terkecil adalah biaya teknologi.

Adapun tinjauan dari perspektif teori *efficiency economic value* dalam proses pengadaan ATK sebagaimana yang diuraikan dalam proses pencairan dana (pembayaran) barang ATK yang menunjukkan adanya *asymetric information* sehingga hal itu menyebabkan biaya transaksi yang dikeluarkan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap harga barang di pasaran melalui wawancara terhadap penjual kertas di pasar (toko) diperoleh informasi bahwa harga kertas A4 tahun 2011 adalah Rp 34.000 per rim, Hasil wawancara terhadap salah satu pemilik perusahaan supplier menawarkan harga kertas A4 adalah Rp 39.000 per rim sementara harga

pengadaan kertas A4 di Sekretariat Daerah Provinsi Maluku adalah Rp 45.000 per rim. Ini menunjukkan bahwa biaya pengadaan ATK khususnya kertas A4 di Sekretariat Daerah Provinsi Maluku adalah lebih tinggi dari harga pasar. Jadi perspektif teori *efficiency economic value* terhadap biaya transaksi pengadaan ATK pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011 adalah kurang efisien. Jika dilakukan efisiensi harga kertas A4 dengan mengadakan kertas A4 pada supplier yang lebih murah harganya, maka terjadi penurunan harga dari Rp 45.000 menjadi Rp 39.000. Adapun prosentase harga kertas yang dapat diturunkan adalah sebesar  $= \frac{45000-39000}{45000} \times 100\% = 13,3\%$ . Ini mengindikasikan bahwa dapat dilakukan efisiensi harga kertas A4 sebesar 13,3 %.

## **2) Besarnya Biaya Transaksi Dalam Proses Pemeliharaan kendaraan Dinas**

Dalam kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas ada proses yang dilalui sebagaimana halnya dalam proses pengadaan ATK. Dalam proses tersebut tentu membutuhkan biaya. Biaya tersebut dibagi atas empat macam yaitu biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya operasional.

Biaya informasi di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan informasi dalam transaksi pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan

Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011. Biaya Informasi ini terdiri atas biaya pulsa telepon/HP dan pulsa internet dalam mencari dan menyampaikan informasi dari atau kepada orang lain.

Biaya teknologi di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai sarana teknologi dalam transaksi pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011. Biaya teknologi terdiri atas biaya biaya pesawat telepon/HP, Perangkat internet, Komputer dan printer. Biaya pesawat telepon/HP digunakan dalam membiayai pengadaan pesawat telepon/HP dalam rangka melakukan komunikasi. Biaya perangkat internet digunakan dalam membiayai perangkat internet yang digunakan dalam mencari dan menyampaikan informasi, memberikan pengumuman dan komunikasi lewat internet. Biaya komputer digunakan dalam membiayai pengadaan komputer yang digunakan untuk melakukan pengetikan surat/dokumen dan pencarian informasi serta komunikasi melalui internet. Biaya printer digunakan dalam pembiayaan pengadaan printer yang digunakan dalam rangka mencetak surat dan dokumen yang terkait pemeliharaan kendaraan dinas.

Biaya administrasi di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan administrasi dalam transaksi pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011. Biaya administrasi tersebut terdiri atas biaya kertas, buku, map, materai, pulpen, tinta printer,

bantal cap, amplop, heker, isi heker dan foto copy. Biaya buku dan kertas digunakan dalam membiayai pembelian buku dan kertas sebagai tempat melakukan pencatatan administrasi. Biaya alat tulis digunakan membiayai pembelian alat tulis yang digunakan dalam menulis pencatatan dan surat dalam administrasi. Biaya materai digunakan dalam membiayai pembelian materai untuk memperkuat legitimasi surat dan kuitansi. Biaya foto copy dan penjilidan digunakan dalam membiayai penggandaan surat-surat dan laporan.

Biaya operasional di sini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan operasional dalam pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011. Biaya operasional ini terdiri atas biaya honorarium, konsumsi, transportasi dan listrik. Biaya honorarium digunakan dalam membiayai honor tim yang terkait dengan pemeliharaan kendaraan dinas yang melakukan perencanaan, penunjukan penyedia jasa, penerimaan jasa, pemeriksaan jasa, pengarsipan dan pelaporan. Tim ini terdiri atas KPA, PPK, kepala, sekretaris dan staf pendukung. Biaya konsumsi digunakan dalam membiayai pembelian konsumsi dalam bentuk makanan berat dan makanan ringan untuk tim pada saat melaksanakan kegiatan operasional seperti rapat. Biaya transportasi digunakan dalam membiayai transportasi tim dalam melakukan survei calon penyedia barang/jasa, survei barang/jasa dan harga barang/jasa. Biaya listrik digunakan dalam membiayai energi listrik yang digunakan

dalam kegiatan operasional seperti listrik untuk perangkat komputer dan penerangan listrik.

Untuk menentukan besarnya biaya transaksi tersebut, maka perlu ditelusuri biaya yang terkait dengan sistem pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011. Untuk itu, penulis melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang terkait langsung dengan pemeliharaan kendaraan dinas pada tahun 2011.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalam proses pemeliharaan kendaraan dinas terdapat beberapa biaya transaksi yaitu:

1. Biaya informasi seperti biaya pulsa telepon/HP dan pulsa internet
2. Biaya teknologi seperti biaya HP/pesawat telepon, komputer/laptop, printer dan perangkat lunak
3. Biaya administrasi seperti kertas, buku, map, pulpen, tinta printer, materai, bantal cap, amplop, heker, isi heker dan foto copy
4. Biaya operasional seperti biaya listrik, transportasi, konsumsi, dan honorarium pegawai.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang tentang perkiraan rincian biaya transaksi pemeliharaan kendaraan dinas pada tahun 2011 yang terdiri atas biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya operasional. Selanjutnya, penulis menghitung besarnya biaya transaksi tersebut. Adapun hasilnya sebagaimana pada uraian berikut ini:

### 1. Biaya Informasi

Rincian besarnya biaya informasi terdiri atas biaya pulsa telpon, HP dan internet sebagaimana pada tabel berikut.

Rincian biaya informasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Biaya informasi pemeliharaan kendaraan dinas

No	Komponen biaya	Volume	Biaya transaksi (Rp)
1	Biaya telepon	24 x Rp 4.000	96.000
2	Pulsa HP	27 x Rp 5.000	135.000
3	Jasa internet	7 x Rp 8.000	56.000
Jumlah			287.000

Sumber: Hasil wawancara kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang

### 2. Biaya Teknologi

Rincian besarnya biaya teknologi terdiri atas biaya HP/pesawat telepon, perangkat internet, komputer/laptop dan printer sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Biaya teknologi pemeliharaan kendaraan dinas

No	Komponen biaya	Volume	Biaya transaksi (Rp)
1	Pesawat telepon	0,5 % x Rp 200.000	1.000
2	Pesawat HP	0,5 % x Rp 2.000.000	10.000
3	Perangkat internet	0,05 % x Rp 4.000.000	2.000
4	Komputer	0,5 % x Rp 3.000.000	15.000
5	Printer	1 % x Rp 1.000.000	10.000
Jumlah			38.000

Sumber: Hasil wawancara kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang

### 3. Biaya Administrasi

Rincian besarnya biaya administrasi terdiri atas biaya kertas, buku, map, alat tulis, tinta printer, amplop, bantal cap, heker, isi heker, materai, dan foto copy sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Biaya administrasi pemeliharaan kendaraan dinas

No	Komponen biaya	Volume	Biaya transaksi (Rp)
1	Buku	2 x Rp 15.000	30.000
2	Kertas	2 rim x Rp 45.000	90.000
3	Alat tulis	1 paket	30.000
4	Tinta printer	1 paket	50.000
5	Amplop	1 paket	20.000
6	Bantal cap	1 buah x Rp 5.000	5.000
7	Hekter dan isinya	1 paket	10.000
8	Materai	72 x Rp 7.000	504.000
9	Foto copy dan penjilidan	1 paket	120.000
Jumlah			859.000

Sumber: Hasil wawancara kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang

### 4. Biaya Operasional

Rincian besarnya biaya operasional terdiri atas biaya honorarium, konsumsi, transportasi dan listrik sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas

No	Komponen biaya	Volume	Biaya transaksi (Rp)
1	Honor KPA	1 orang	960.000
2	Honor PPK	1 orang	900.000
3	Honor Kepala	1 orang	900.000

Lanjutan tabel 4.10

4	Honor Sekretaris	1 orang	720.000
5	Honor Staf pendukung	1 orang	600.000
6	Konsumsi makanan besar	34 orang x Rp 20.000	680.000
7	Konsumsi makanan kecil	26 orang x Rp 8000	208.000
8	Transportasi	29 kali x Rp 40.000	1.160.000
9	Listrik	1 paket	340.000
Jumlah			6.468.000

Sumber: Hasil wawancara kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah dari setiap komponen biaya transaksi, maka disusunlah rekapitulasi biaya transaksi pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11 Rekapitulasi biaya transaksi pemeliharaan kendaraan dinas

No	Komponen biaya	Biaya transaksi (Rp)
1	Biaya informasi	287.000
2	Biaya teknologi	38.000
3	Biaya administrasi	859.000
4	Biaya operasional	6.468.000
Total		7.652.000

Berdasarkan rekapitulasi jumlah biaya transaksi berdasarkan komponen biaya transaksi di atas, maka dihitunglah rasio komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi dengan menggunakan rumus dalam Marasabessy, A. Z. (2011):

$$RBT_i = \frac{BT_i}{TBT}$$

Dimana:

$RBT_i$  = Rasio biaya transaksi komponen ke-i terhadap total biaya transaksi

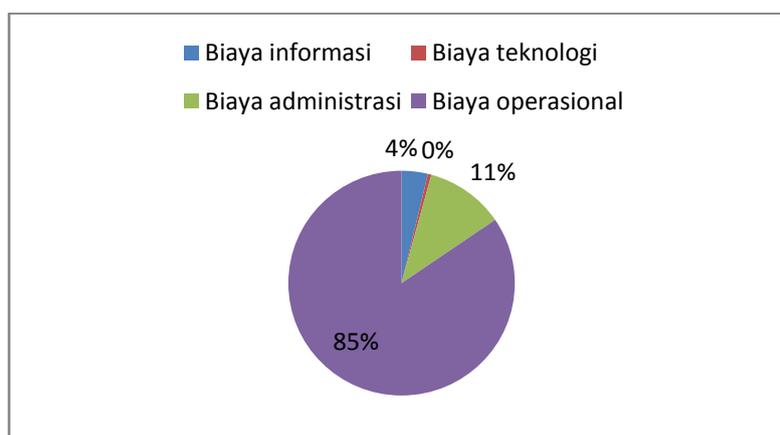
$BT_i$  = jumlah biaya transaksi komponen ke-i

$TBT$  = Total biaya transaksi

Tabel 4.12 Rasio komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi

No	Komponen biaya	Biaya transaksi (Rp)	Rasio		
1	Biaya informasi	287.000	0,038	atau	3,75
2	Biaya teknologi	38.000	0,005	atau	0,50
3	Biaya administrasi	859.000	0,112	atau	11,23
4	Biaya operasional	6.468.000	0,845	atau	84,53
Total		7.652.000	1,000	atau	100,00

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2 Rasio komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi pemeliharaan kendaraan dinas (Sumber: Hasil perhitungan rasio pada tabel 4.12)

Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa biaya dan rasio terbesar dari ke empat komponen biaya transaksi tersebut adalah biaya operasional sedang yang terkecil adalah biaya teknologi.

Adapun tinjauan dari perspektif teori *efficiency economic value* sebagaimana yang dicontohkan dalam proses pemeliharaan kendaraan dinas yaitu pada proses dico yang menunjukkan adanya *asymetric information* sehingga hal itu menyebabkan biaya transaksi yang dikeluarkan menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap biaya salah satu sampel biaya pemeliharaan kendaraan dinas yaitu sporing balancing di bengkel mobil melalui wawancara terhadap karyawan bengkel diperoleh informasi bahwa biaya sporing balancing pada tahun 2011 adalah Rp 200.000 per mobil sementara biaya sporing balancing kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Provinsi Maluku adalah Rp 275.000 per mobil. Ini menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dinas khususnya sporing balancing kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Provinsi Maluku adalah lebih tinggi dari biaya pasar. Jadi perspektif teori *efficiency economic value* terhadap biaya transaksi pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tahun 2011 adalah kurang efisien.

Jika dilakukan efisiensi biaya sporing balancing dengan cara melaksanakan sporing balancing mobil pada bengkel yang lebih murah, maka terjadi penurunan harga dari Rp 275.000 menjadi Rp 200.000.

Adapun prosentase biaya spooring balancing yang dapat diturunkan adalah sebesar  $= \frac{275000 - 200000}{275000} \times 100 \% = 27,3 \%$ .

Ini mengindikasikan bahwa dapat dilakukan efisiensi biaya spooring balancing sebesar 27,3 %.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Analisis Proses Pengadaan ATK dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku**

##### **a. Analisis Proses Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku**

Sistem pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui metode lelang, swakelola, penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Metode pemilihan penyedia pengadaan ATK pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2011 adalah penunjukan langsung.

Dalam analisis ini, dicari alternatif metode pemilihan penyedia barang ATK lalu dibandingkan kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar dalam penentuan kebijakan. Adapun tinjauan terhadap metode pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 sebagaimana pada uraian berikut.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui penyedia barang atau swakelola. Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan

pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau kontes/sayembara.

Dalam pasal 3 dinyatakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa. Dalam Pasal 26 ayat 2 dinyatakan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi:

- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
- b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
- c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
- d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan ATK dan pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tidak cocok dilakukan dengan cara swakelola.

Dalam Pasal 35 ayat (2) dinyatakan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan:

- a. Pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan sederhana;

- b. Penunjukan langsung;
- c. Pengadaan langsung; atau
- d. Kontes/sayembara.

Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengadaan ATK dan pemeliharaan kendaraan dinas tidak cocok dilakukan melalui swakelola, sayembara dan kontes.

Dalam pasal 31 dinyatakan:

- (1) Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  - b. teknologi sederhana;
  - c. risiko kecil; dan/atau
  - d. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut

kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.

- (2) Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- (3) Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
- (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Selanjutnya, dalam pasal 57 ayat (3) dinyatakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pengadaan langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

- a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda;
- b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
- c. klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.

Berdasarkan data laporan keuangan pembayaran pengadaan ATK pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, biaya pengadaan ATK pada setiap triwulan sebesar Rp 38.570.210. Ini menunjukkan bahwa pengadaannya tidak dilakukan sekaligus melainkan dilakukan setiap triwulan.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan panitia pengadaan barang tahun 2011 menunjukkan bahwa terkadang ada ATK yang dibutuhkan yang tidak sama dengan rencana sebelumnya sehingga dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai pembandingan, metode pemilihan penyedia barang ATK pada Politeknik Negeri Ujung Pandang melalui pengadaan langsung. Jadi metode pemilihan penyedia barang ATK dapat dilakukan melalui pengadaan langsung. Sehubungan dengan itu, perlu dianalisis perbandingan proses pengadaan ATK melalui penunjukan langsung dengan pengadaan langsung. Adapun perbandingan proses pengadaan ATK sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 13 Perbandingan proses pengadaan ATK

Proses pengadaan ATK melalui Penunjukan langsung	Proses Pengadaan ATK melalui Pengadaan langsung
--	---

<p>1. Proses pemilihan penyedia barang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen pengadaan</li> <li>b. Pemasukan dokumen kualifikasi</li> <li>c. Evaluasi kualifikasi</li> <li>d. Pemberian penjelasan</li> <li>e. Pemasukan dokumen penawaran</li> <li>f. Evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga</li> <li>g. Penetapan pemenang</li> <li>h. Pengumuman pemenang</li> <li>i. Penunjukan penyedia barang/jasa.</li> </ol> <p>2. Proses pelaksanaan pengadaan ATK terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan stok barang</li> <li>b. Menaksir kebutuhan barang</li> <li>c. Mengorder barang</li> <li>d. Mengadakan/mendatangkan barang</li> <li>e. Pemeriksaan barang</li> <li>f. Membuat serah terima barang</li> <li>g. Pembayaran barang</li> <li>h. Membuat administrasi pengadaan barang.</li> </ol> <p>3. Pelaporan pengadaan ATK terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan laporan</li> <li>b. Penggandaan laporan</li> <li>c. Penyerahan laporan</li> </ol>	<p>1. Proses pemilihan penyedia barang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 penyedia barang;</li> <li>b. Membandingkan harga penawaran dengan harga perkiraan sendiri (HPS)</li> <li>c. Klarifikasi teknis dan negosiasi harga.</li> </ol> <p>2. Proses pelaksanaan pengadaan ATK terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan stok barang</li> <li>b. Menaksir kebutuhan barang</li> <li>c. Mengorder barang,</li> <li>d. Mengadakan/mendatangkan barang</li> <li>e. Pemeriksaan barang</li> <li>f. Membuat serah terima barang</li> <li>g. Pembayaran barang</li> <li>h. Membuat administrasi pengadaan barang.</li> </ol> <p>3. Pelaporan pengadaan ATK terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan laporan</li> <li>b. Penggandaan laporan</li> <li>c. Penyerahan laporan</li> </ol>
---	---

Sumber: Hasil wawancara (diolah)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya, proses pengadaan ATK melalui penunjukan langsung dengan pengadaan langsung berbeda dalam proses pemilihan penyedia barang sedangkan dalam proses pelaksanaan

pengadaan barang dan pelaporan adalah sama. Jadi proses pengadaan ATK melalui penyedia barang dengan metode penunjukan langsung lebih panjang dari proses pengadaan ATK melalui penyedia barang dengan metode pengadaan langsung. Adapun perbandingan kelebihan/kekurangan proses pengadaan ATK melalui penunjukan langsung dengan pengadaan langsung sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.14 Perbandingan kelebihan/kekurangan proses pengadaan ATK melalui penunjukan langsung dengan pengadaan langsung

No	Aspek (Indikator)	Penunjukan langsung	Pengadaan langsung
1	Panjang proses	Sedang	Pendek
2	Lama kegiatan/ transaksi (waktu)	Sedang	Singkat
3	Banyaknya pejabat pengadaan	Ganjil minimal 3 orang	1 orang
4	Tenaga (energi) yang digunakan	Sedang	Kurang
5	Banyaknya biaya transaksi	Sedang	Kurang
6	Harga beli barang	Sedang	Murah
7	Kuantitas hasil barang/jasa	Sedang	Banyak
8	Kualitas hasil barang	Sedang	Baik
9	Ketepatan waktu pengadaan	Sedang	tepat
10	Kesesuaian kebutuhan	Sedang	Sesuai

Berdasarkan perbandingan di atas menunjukkan bahwa dinilai dari aspek panjang proses, lama kegiatan, banyaknya pejabat pengadaan, tenaga (energi) yang digunakan, banyaknya biaya transaksi, harga beli barang, kuantitas hasil barang/jasa, kualitas hasil barang/jasa, ketepatan waktu pengadaan dan kesesuaian

kebutuhan proses pengadaan ATK melalui pengadaan langsung lebih baik dari penunjukan langsung.

Untuk itu disarankan merubah metode pemilihan penyedia barang ATK dari penunjukan langsung menjadi pengadaan langsung.

#### **b. Analisis Proses Pemeliharaan Kendaraan Dinas**

Metode pemilihan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2011 adalah pelelangan umum. Dalam analisis ini, dicari alternatif metode pemilihan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas lalu dibandingkan kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar dalam penentuan kebijakan.

Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas tidak dilakukan sekaligus melainkan sangat sesuai dengan situasi kapan kendaraan mengalami kerusakan. Selain itu, dari hasil wawancara dengan panitia pengadaan barang/jasa tahun 2011 menunjukkan bahwa terkadang kendaraan rusak di jalan dan membutuhkan waktu pelaksanaan pemeliharaan kendaraan yang cepat sehingga dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas dimana jasanya merupakan kebutuhan operasional, risiko kecil, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, jumlah dan waktu kebutuhan yang bisa

berubah dari perencanaan sehingga pemeliharaan kendaraan dinas bisa dilakukan melalui pengadaan langsung.

Jadi alternatif penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang mungkin adalah pelelangan, penunjukan langsung dan pengadaan langsung.

Pelelangan tentu membutuhkan waktu, biaya dan tenaga jika dibandingkan dengan penunjukan langsung. Untuk itu, perlu dianalisis proses pemeliharaan kendaraan dinas melalui metode pelelangan umum dengan pengadaan langsung. Adapun perbandingan proses pemeliharaan kendaraan dinas melalui metode pelelangan umum dengan metode pengadaan langsung sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 15 Perbandingan proses pemeliharaan kendaraan dinas

Proses pemeliharaan kendaraan dinas melalui metode pelelangan umum	Proses pemeliharaan kendaraan dinas melalui metode pengadaan langsung
--	---

<p>1. Proses pemilihan penyedia jasa terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumuman prakualifikasi;</li> <li>b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;</li> <li>c. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi;</li> <li>d. Pembuktian kualifikasi;</li> <li>e. Penetapan hasil kualifikasi;</li> <li>f. Pengumuman hasil kualifikasi;</li> <li>g. Sanggahan kualifikasi;</li> <li>h. Undangan;</li> <li>i. Pengambilan dokumen pemilihan;</li> <li>j. Pemberian penjelasan;</li> <li>k. Pemasukan dokumen penawaran tahap I;</li> <li>l. Pembukaan dokumen penawaran tahap I;</li> <li>m. Evaluasi dokumen penawaran tahap I;</li> <li>n. Penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;</li> <li>o. Pemberitahuan/ pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;</li> <li>p. Pemasukan dokumen penawaran tahap II;</li> <li>q. Pembukaan dokumen penawaran tahap II;</li> <li>r. Evaluasi dokumen penawaran tahap II;</li> <li>s. Pembuatan berita acara hasil pelelangan;</li> <li>t. Penetapan pemenang;</li> <li>u. Pengumuman pemenang;</li> <li>v. Sanggahan;</li> <li>w. Sanggahan banding (apabila diperlukan);</li> <li>x. Penunjukan penyedia barang/jasa</li> <li>y. Undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen pengadaan</li> <li>z. Pemasukan dokumen kualifikasi       <ol style="list-style-type: none"> <li>aa. Evaluasi kualifikasi</li> <li>bb. Pemberian penjelasan</li> <li>cc. Pemasukan dokumen penawaran</li> <li>dd. Evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga</li> <li>ee. Penetapan pemenang</li> <li>ff. Pengumuman pemenang</li> <li>gg. Penunjukan penyedia barang/jasa.</li> </ol> </li> </ol>	<p>1. Proses pemilihan penyedia barang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 penyedia jasa;</li> <li>b. Membandingkan harga/biaya penawaran dengan harga perkiraan sendiri (HPS)</li> <li>c. Klarifikasi teknis dan negosiasi harga.</li> </ol>
--	---

Lanjutan tabel 4. 15

<p>2. Proses pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pejabat pengadaan barang/jasa memeriksa kerusakan kendaraan</li> <li>b. Menaksir biaya perbaikan;</li> <li>c. Koordinasi dengan penyedia jasa perbaikan (bengkel),</li> <li>d. Pemeriksaan kendaraan;</li> <li>e. Penentuan biaya dan kesepakatan harga;</li> <li>f. Pelaksanaan perbaikan/pemeliharaan kendaraan;</li> <li>g. Melaksanakan perbaikan; evaluasi hasil perbaikan;</li> <li>h. Pembayaran dan pengambilan bukti pembayaran lalu diserahkan ke pejabat pengadaan barang.</li> </ol> <p>3. Pelaporan pemeliharaan kendaraan dinas terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan laporan</li> <li>b. Penggandaan laporan</li> <li>c. Penyerahan laporan</li> </ol>	<p>2. Proses pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pejabat pengadaan barang/jasa memeriksa kerusakan kendaraan</li> <li>b. Menaksir biaya perbaikan;</li> <li>c. Koordinasi dengan penyedia jasa perbaikan (bengkel),</li> <li>d. Pemeriksaan kendaraan;</li> <li>e. Penentuan biaya dan kesepakatan harga;</li> <li>f. Pelaksanaan perbaikan/pemeliharaan kendaraan;</li> <li>g. Melaksanakan perbaikan; evaluasi hasil perbaikan;</li> <li>h. Pembayaran dan pengambilan bukti pembayaran lalu diserahkan ke pejabat pengadaan barang.</li> </ol> <p>Pelaporan pemeliharaan kendaraan dinas terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan laporan</li> <li>b. Penggandaan laporan</li> <li>c. Penyerahan laporan</li> </ol>
--	---

Sumber: Hasil wawancara (diolah)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya, proses pemeliharaan kendaraan dinas melalui pelelangan umum dengan pengadaan langsung berbeda dalam proses pemilihan penyedia jasa sedangkan dalam proses pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas dan pelaporan adalah sama. Jadi proses pemeliharaan kendaraan dinas melalui penyedia barang dengan metode pelelangan umum lebih panjang dari melalui pengadaan langsung. Adapun perbandingan kelebihan/kekurangan proses pemeliharaan kendaraan dinas melalui pelelangan umum dengan pengadaan langsung pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16 Perbandingan kelebihan/kekurangan proses pemeliharaan kendaraan dinas melalui pelelangan umum dengan pengadaan langsung

No	Aspek (Indikator)	Pelelangan Umum	Pengadaan langsung
1	Panjang proses	Panjang	Pendek
2	Lama kegiatan/ transaksi (waktu)	Lama	Singkat
3	Banyaknya pejabat pengadaan	Ganjil minimal 3 orang	1 orang
4	Tenaga (energi) yang digunakan	Banyak	Kurang
5	Banyaknya biaya transaksi	Banyak	Kurang
6	Biaya pemeliharaan	Mahal	Murah
7	Kuantitas hasil barang/jasa	Mahal	Banyak
8	Kualitas hasil barang/jasa	Kurang	Baik
9	Ketepatan waktu pengadaan	Kurang	tepat
10	Kesesuaian kebutuhan	Kurang	Sesuai

Berdasarkan perbandingan di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek proses panjang proses, lama kegiatan, banyaknya pejabat pengadaan, tenaga (energi) yang digunakan, banyaknya biaya transaksi, biaya pemeliharaan, kuantitas hasil barang/jasa, kualitas hasil barang/jasa, ketepatan waktu pengadaan dan kesesuaian kebutuhan menunjukkan bahwa pemeliharaan kendaraan dinas melalui pengadaan langsung lebih baik dari pelelangan umum. Untuk itu disarankan merubah metode pemilihan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas dari pelelangan umum menjadi pengadaan langsung.

## **2. Analisis Biaya Transaksi dalam Proses Pengadaan ATK dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Dinilai dari Perspektif Teori**

Dalam analisis ini akan dianalisis biaya transaksi (baik transaksi dalam pengadaan ATK maupun pemeliharaan kendaraan dinas) dinilai dari perspektif teori yaitu teori informasi asimetri (*asymmetric information*), teori perilaku peluang (*opportunity behavior*) dan teori nilai ekonomis efisiensi (*efficiency economic value*). Dalam menganalisis nilai ekonomi terkait dengan efisiensi dan efektivitas dari biaya transaksi. Adapun analisis tersebut sebagai berikut.

### **a. Tinjauan dari Perspektif Teori Informasi Asimetri (*Asymmetric Information*)**

*Asymmetric information* adalah perbedaan informasi yang dimiliki oleh *service supply* (aparatur pelayanan) dengan informasi yang diketahui dan diterima oleh *service demand* (masyarakat yang dilayani) (Tietz, 2002: 121).

Dari hasil wawancara penulis terhadap informan menunjukkan bahwa terkadang dalam organisasi, terjadi asimetri informasi. Selain itu, dari contoh kasus *asymmetric information* dalam pembayaran hasil pengadaan ATK dan proses dico kendaraan dinas menyebabkan orang yang dilayani tidak puas bahkan kesal terhadap ketidaktepatan janji dan tidak adanya pemberitahuan penundaan. Ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dapat menyebabkan kesalahan dan kelambatan dalam pelayanan. Selain itu, masyarakat yang dilayani menjadi kehilangan kepercayaan terhadap aparat pelayan dan ketidakpuasan. Ini berarti asimetri informasi dapat menyebabkan kualitas pelayanan rendah. Selanjutnya, jika terjadi asimetri informasi maka akan menyebabkan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi panjang dan lama sehingga biaya transaksi dapat meningkat.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi *asymmetric information* maka semakin rendah kualitas pelayanan organisasi kepada publik. Temuan penelitian ini sejalan dengan proposisi pertama dari penelitian ini yakni “semakin tinggi *asymmetric information* maka semakin rendah kualitas pelayanan organisasi kepada publik.”

Temuan penelitian di atas sejalan dengan Teori *asymmetric information* sebagaimana diungkapkan oleh Tietz (2002: 121) bahwa kajian ilmu administrasi menjadikan teori *asymmetric information* sebagai kajian untuk melihat adanya

hubungan yang saling terkait antara permintaan pelayanan (*service demand*) dengan penawaran pelayanan (*service supply*) untuk menghasilkan keseimbangan (*equilibrium*) pelayanan yang menguntungkan antara pemerintah dan publik.

Temuan penelitian di atas sejalan dengan Thaler (2003: 206) bahwa konsepsi teori *asymmetric information* merupakan suatu kegiatan secara langsung mengenai proses informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik tanpa mengabaikan pentingnya informasi sebagai sebuah peluang untuk memenuhi kepuasan publik. Atas dasar tersebut maka biaya transaksi suatu pelayanan tergantung pada muatan informasi yang diberikan oleh pihak pengambil kebijakan.

Temuan penelitian di atas sejalan dengan (Tood, Lebey, 2005: 223) adanya kepentingan dua belah pihak menimbulkan efek permintaan dan efek penawaran untuk menghasilkan keuntungan pembiayaan yang dapat digunakan secara operasional dalam pencapaian tujuan organisasi dan kepuasan publik

Ini berarti, biaya transaksi pelayanan menjadikan teori *asymmetric information* sebagai bagian penting di dalam menguraikan unsur-unsur yang berperan penting dalam rantai biaya transaksi. Semakin bagus pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah, semakin berperan penting biaya transaksi yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan publik.

Adapun justifikasi penulis adalah bahwa dalam suatu organisasi dibutuhkan keterbukaan dan kejelasan informasi. Jika informasi tersebut terbuka dan dipahami oleh semua aparat pelayanan, maka aparat tersebut dapat bekerja dalam tim dengan baik sehingga pelayanan dapat berjalan lancar dan cepat. Sebaliknya,

jika dalam suatu organisasi terjadi kesimpangsiuran informasi, maka pelayanan akan terganggu. Demikian halnya, jika terjadi keterbukaan dan kejelasan informasi dari aparat pelayanan terhadap publik, maka publik akan dapat dengan mudah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam pelayanan sehingga publik akan dapat mempersiapkan diri dalam rangka memenuhi pelayanan yang baik. Ini menunjukkan bahwa proposisi pertama yang menyatakan bahwa semakin tinggi *asymmetric information*, maka semakin rendah kualitas pelayanan organisasi kepada publik adalah terbukti.

Sehubungan dengan itu, maka diharapkan aparat pelayanan memberikan informasi yang terbuka, akurat dan adil kepada masyarakat dalam rangka meminimasi *asymmetric information* agar pelayanan dapat berjalan lancar. Hal ini dapat berdampak pada kepuasan masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada aparat.

#### **b. Tinjauan dari Perspektif Teori *Opportunity Behavior***

*Opportunity behavior* adalah perilaku aparat pelayanan dalam mencari dan memanfaatkan peluang untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan meminimasi biaya transaksi (Webley (2005: 155), Traub, (2000: 122), Tversky (2004: 74) dan Tietz (2002: 163))

Dari hasil wawancara penulis terhadap informan menunjukkan bahwa perilaku aparat (birokrasi) adalah adanya kemauan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat tapi di sisi lain, dari contoh kasus dimana aparat pelayanan yang tidak memberitahukan penundaan penetapan janji dan tidak

adanya upaya dari bagian pengadaan untuk cepat melayani masyarakat menunjukkan bahwa ada juga aparat pelayanan yang kurang memanfaatkan peluang untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jika orang yang melayani memiliki kemauan yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pelayanan tersebut akan berjalan dengan baik. Perilaku berupa kemauan tersebut dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada publik. Perilaku aparat pelayanan yang memanfaatkan peluang untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik akan berdampak pada tingginya kualitas pelayanan tersebut.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa aparat pelayanan yang memiliki *Opportunity behavior* yang tinggi akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik. Perilaku tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan. Ini berarti semakin tinggi *opportunity behavior*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik. Temuan penelitian ini mendukung proposisi kedua dari penelitian ini yakni “Semakin tinggi *opportunity behavior*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik”. Pelayanan yang baik akan menyebabkan proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan lancar dan cepat sehingga biaya transaksi bisa menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Webley (2005: 155) yang menyatakan keberhasilan suatu biaya transaksi dalam organisasi ditentukan dari perilaku birokrasi yang mencari peluang untuk memperoleh keuntungan. Ini berarti peluang menjadi penting dari perilaku pelaksana untuk menghasilkan pelayanan terbaik yang dengan sendirinya publik akan membayar dengan biaya transaksi

yang sesuai tanpa menimbulkan adanya apresiasi yang negatif. Keuntungan bagi aparat bisa diraih dengan pelayanan yang baik dan tidak meminimalkan biaya. Jika biaya diminimasi tentu akan mengurangi keuntungan secara ekonomi bagi aparat birokrasi; Traub (2000: 122) bahwa sebuah organisasi berupaya mengembangkan perilaku aparat di dalam menerapkan teori *opportunity behavior* sebagai langkah kongkrit untuk memperbaiki pelayanan dalam menghasilkan biaya transaksi yang optimal. Tietz (2002: 163) bahwa organisasi dalam upaya memperoleh keuntungan optimal, berupaya memperbaiki *opportunistic behavior* sebagai penyikapian untuk menghasilkan optimalisasi keuntungan dengan meminimalkan biaya yang dikenakan. Tietz (2002: 163) memformulasikan *opportunistic behavior* sama dengan *benefit optimization* (keuntungan optimal) dikurangi *minimization cost* (minimalisasi biaya) dengan rumus sebagai berikut.

$$OB = BO - MC$$

Dimana: OB = *opportunistic behavior*, BO = *benefit optimization*, MC = *minimization cost*

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hart, Silberd (2007) yang menunjukkan bahwa *opportunistic behavior* yang baik akan berdampak pada biaya transaksi pelayanan yang murah dan adil.

Adapun jastifikasi penulis adalah aparat pemerintah sebagai unsur penggerak organisasi pemerintahan memiliki kemauan dan usaha untuk memberikan pelayanan yang optimal tapi sangat sedikit kemauan dan usaha untuk meminimasi biaya transaksi. Pelayanan yang optimal akan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang akan berdampak pada kepuasan masyarakat sehingga

masyarakat mau membayar walau dengan harga tinggi. Hanya saja biaya transaksi yang minimal akan mengurangi pendapatan secara ekonomi bagi aparat yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Optimalisasi *opportunistic behavior* tercapai bila pelayanan yang optimal dan biaya yang minimal. Untuk mencapai kondisi yang optimal tersebut maka harus ada kemauan dan komitmen dari pimpinan organisasi. Jika ada kemauan dan komitmen pimpinan akan menyebabkan aparat pelayanan bekerja secara maksimal dan meminimasi biaya. Bawahan tentu akan berusaha meminimasi biaya karena adanya kemauan dan komitmen dari pimpinan untuk meminimasi biaya tersebut.

Kualitas pelayanan sangat tergantung dari kemauan dan usaha dari aparat pelayanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemauan dan usaha tersebut menunjukkan *opportunity behavior* dari aparat pelayanan. Sehubungan dengan itu, semakin tinggi *opportunity behavior*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik. Jadi proposisi kedua yang menyatakan bahwa semakin tinggi *opportunity behavior*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik adalah terbukti.

Sehubungan dengan itu, maka diharapkan kepada aparat pelayanan agar memiliki kemauan dan usaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

### **c. Tinjauan dari Perspektif Teori *efficiency economic value***

*Efficiency economic value* adalah aktivitas yang dilakukan oleh aparat pelayanan dalam memberikan pelayanan dengan mempertimbangkan nilai secara

ekonomis dari hasil pelayanan tersebut (Viscusi, WK. (2003: 79), Wittman, DA (2004: 246) dan Birl, Higgins (2003: 195)).

Dari hasil wawancara penulis terhadap informan menunjukkan bahwa ada kecenderungan biaya yang tinggi akan menyebabkan pelayanan berkualitas, atau pelayanan yang berkualitas diharapkan dibarengi dengan adanya insentif. Selain itu, dari contoh kasus menunjukkan bahwa dalam proses pembayaran ATK dan proses dico kendaraan dinas menunjukkan bahwa biaya transaksi kurang efisien. Terkadang ada kesengajaan dari aparat pelayanan untuk memperpanjang proses atau menunda-nunda pekerjaan agar timbul kemauan dari pihak yang dilayani memberikan uang pelicin untuk memperlancar dan mempercepat pekerjaan. Nilai ekonomi di sini bisa diukur dari waktu, biaya dan tenaga untuk melaksanakan proses pekerjaan. *Efficiency economic value* dapat dilakukan dengan cara penyederhanaan proses, memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada masyarakat. Efisiensi nilai ekonomi tersebut akan menyebabkan masyarakat yang dilayani merasa puas. Ini menunjukkan bahwa efisiensi nilai ekonomi dapat menyebabkan pelayanan semakin berkualitas.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aparat pelayanan melakukan efisiensi nilai ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas tapi jarang melakukan minimasi biaya. Semakin tinggi efisiensi nilai ekonomi yang dilakukan oleh aparat semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik.

Temuan penelitian ini mendukung proposisi ketiga dari penelitian ini yakni “Semakin tinggi *efficiency economic value*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik.”

Temuan penelitian ini sejalan dengan Ritzer (2005: 215) menyatakan keuntungan suatu organisasi tergantung pada efisiensi nilai ekonomis yang digunakan untuk memprediksi besarnya keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan transaksi pelayanan. Temuan ini sejalan pula dengan Viscusi, WK. (2003: 79) bahwa semakin banyak transaksi pelayanan yang terjadi dalam suatu organisasi semakin memberikan nilai tambah ekonomis bagi organisasi tersebut memperoleh keuntungan; Wittman, DA (2004: 246) bahwa semakin banyak manfaat dari transaksi yang diterapkan, upaya minimalisasi biaya semakin besar nilai ekonomis dilakukan oleh organisasi; Birl, Higgins (2003: 195) bahwa biaya transaksi yang tinggi dibarengi dengan pelayanan yang memuaskan menjadi nilai tambah bagi organisasi untuk maju dan berkembang.

Temuan penelitian ini pula mendukung hasil penelitian Hart, Silberd (2007) setiap kegiatan pelayanan kepada publik disesuaikan dengan besarnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kegiatan pelayanan dan *opportunistic behavior* yang baik akan berdampak pada biaya transaksi pelayanan yang murah dan adil. Mendukung pula hasil penelitian Harrison, William (2008) yang menunjukkan bahwa biaya transaksi dinilai efektif dan praktis untuk memotivasi publik memberikan biaya transaksi dalam kegiatan pelayanan untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan birokrasi. Dalam melakukan suatu pelayanan ditemukan adanya hubungan rasional berdasarkan kepentingan, motif

dan tujuan yang komparatif dengan tingkat pencapaian hasil yang diinginkan publik.

Adapun jastifikasi peneliti adalah secara organisasi pemerintahan, harusnya sumber daya manusia dari organisasi tersebut memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan menggunakan sedikit biaya. Namun, dari sisi sumber daya manusia yakni banyak aparat pelayanan yang berusaha agar biaya diminimasi bahkan ada yang sengaja mencari cara agar biaya transaksi menjadi tinggi terutama pada biaya operasional sehingga ada keuntungan secara ekonomi bagi aparat pelayanan. Efisiensi nilai ekonomi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan dan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki. Upaya yang dilakukan aparat pelayanan dalam meningkatkan efisiensi nilai ekonomi adalah meningkatkan kualitas pelayanan tapi sangat jarang dilakukan minimasi biaya transaksi. Jadi pelayanan yang berkualitas biasanya dibarengi dengan biaya yang tinggi. Aparat pelayanan yang memiliki *opportunistic behavior* yang tinggi tentunya berusaha meningkatkan kualitas pelayanan. Pemanfaatan sumber daya secara baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi semakin tinggi *efficiency economic value*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik.

Keterkaitan dengan *efficiency economic value*, maka proses pengadaan ATK dan pemeliharaan kendaraan dinas perlu dianalisis efisiensi dan efektivitasnya.

### **1) Analisis Efisiensi Biaya Transaksi Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas**

Efisiensi diukur melalui tingkat upaya (dana dan daya) yang dikeluarkan untuk melakukan transaksi pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka mencapai hasil dan sasaran yang ditetapkan.

Teori *efficiency economic value* atau teori nilai ekonomi efisien merupakan sebuah teori untuk melihat tingkat pemanfaatan suatu kegiatan biaya transaksi dinilai dari aspek ekonomi berupa untung atau rugi. Ritzer (2005: 215) menyatakan keuntungan suatu organisasi tergantung pada efisiensi nilai ekonomis yang digunakan untuk memprediksi besarnya keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan transaksi pelayanan. Unsur-unsur penting dari suatu tahapan efisiensi nilai ekonomi adalah unsur transaksi, manfaat, keuntungan, kerugian dan kepentingan.

Efisiensi biaya adalah tingkat penggunaan anggaran berdasarkan jumlah untuk membiayai transaksi. Makin sedikit biaya yang dikeluarkan makin efisien. Jadi kriteria yang digunakan adalah kriteria biaya. Biaya tersebut bisa dikaitkan dengan harga pasar. Selain itu, dapat juga berdasarkan pertimbangan proses, waktu dan tenaga. Makin singkat proses, makin kurang waktu dan tenaga yang digunakan menunjukkan makin efisien. Jadi efisiensi dapat dilihat dari aspek biaya, waktu dan tenaga.

Untuk memilih proses pengadaan ATK yang paling efisien, maka dianalisis dua metode pemilihan penyedia barang yaitu penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Adapun perbandingan biaya transaksinya menurut penulis adalah daya

dan biaya yang dibutuhkan untuk transaksi pengadaan ATK sistem pengadaan langsung akan lebih murah dibanding penunjukan langsung. Perubahan dari penunjukan langsung menjadi pengadaan langsung akan mengakibatkan pengurangan daya dan dana transaksi pengadaan ATK. Adapun pengurangan daya sebagai berikut:

1. Prosesnya penunjukan langsung penyedia barang yang dimulai dari kegiatan mengundang penyedia ATK yang memenuhi syarat sampai pada evaluasi dan penentuan keputusan penyedia ATK dapat dikurangi
2. Jumlah pejabat pengadaan barang dapat dikurangi dari 3 orang menjadi 1 orang

Ini menunjukkan bahwa dari segi daya terjadi penurunan sehingga menjadi lebih efisien. Selanjutnya tinjauan dari sisi biaya, maka besarnya biaya transaksi dapat dikurangi. Adapun biaya transaksi yang dapat dikurangi adalah pada komponen biaya operasional yaitu

1. Jumlah pejabat pengadaan barang berkurang dari 3 orang menjadi 1 orang. Jadi terjadi penurunan honorarium sekretaris dan staf pendukung sebesar Rp 1.320.000
2. Konsumsi makanan besar dan konsumsi makanan kecil bisa berkurang 50 % sehingga terjadi penurunan sebesar Rp 180.000.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa jika dilakukan perubahan dari sistem penunjukan langsung menjadi pengadaan langsung akan terjadi penurunan biaya transaksi sebesar Rp 1.500.000. Jadi total biaya transaksi pengadaan ATK akan menurun dari Rp 5.567.000 menjadi Rp 4.067.000.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh biaya minimal sebesar Rp 4.067.000 dan biaya sebenarnya dikeluarkan Rp 5.567.000. Jadi besarnya tingkat efisiensi biaya transaksi pengadaan ATK adalah

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{4.067.000}{5.567.000} \times 100 \% = 73 \%$$

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi biaya transaksi dalam proses pengadaan ATK pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku

Berdasarkan uraian di atas, maka pengadaan ATK sebaiknya dilakukan melalui pengadaan langsung dalam rangka meningkatkan efisiensi proses dan biaya pengadaan ATK.

Selanjutnya, untuk menganalisis efisiensi kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dibandingkan dua alternatif proses pemilihan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas yaitu melalui pelelangan umum dan pengadaan langsung. Sudah diuraikan sebelumnya bahwa biaya transaksi pada sistem pengadaan langsung lebih rendah dari sistem penunjukan langsung.

Sehubungan dengan itu, maka untuk memilih sistem yang paling efisien, maka ditinjau dua sistem yaitu pelelangan umum dan pengadaan langsung. Adapun perbandingan biaya transaksinya menurut penulis adalah daya dan biaya yang dibutuhkan untuk transaksi pemeliharaan kendaraan dinas sistem pengadaan langsung akan lebih murah dibanding pelelangan umum. Perubahan dari pelelangan umum menjadi pengadaan langsung akan mengakibatkan pengurangan

daya dan dana transaksi pemeliharaan kendaraan dinas. Adapun pengurangan daya sebagai berikut:

1. Prosesnya pelelangan umum yang dimulai dari kegiatan pengumuman di media elektronik dan di kantor sampai pada evaluasi dan penentuan keputusan pemenang lelang ditiadakan. Jadi ada beberapa proses atau aktivitas yang berkurang
2. Jumlah pejabat pengadaan barang dapat dikurangi dari 3 orang menjadi 1 orang

Ini menunjukkan bahwa dari segi daya terjadi penurunan sehingga menjadi lebih efisien. Selanjutnya tinjauan dari sisi biaya, maka besarnya biaya transaksi dapat dikurangi. Adapun biaya transaksi yang dapat dikurangi adalah pada komponen biaya operasional yaitu

1. Jumlah pejabat pengadaan barang/jasa berkurang dari 3 orang menjadi 1 orang. Jadi terjadi penurunan honorarium sekretaris dan staf pendukung sebesar Rp 1.320.000
2. Konsumsi makanan besar dan konsumsi makanan kecil bisa berkurang 60 % sehingga terjadi penurunan sebesar Rp 532.800.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa jika dilakukan perubahan dari sistem pelelangan umum langsung menjadi pengadaan langsung akan terjadi penurunan biaya transaksi sebesar Rp 1.852.800. Jadi total biaya transaksi pemeliharaan kendaraan dinas akan menurun dari Rp 7.652.000 menjadi Rp 5.799.200.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh biaya minimal sebesar Rp 5.799.200 dan biaya sebenarnya dikeluarkan Rp 7.652.000. Jadi besarnya tingkat efisiensi biaya transaksi pemeliharaan kendaraan dinas adalah

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{5.799.200}{7.652.000} \times 100 \% = 76 \%$$

Berdasarkan uraian di atas, maka pemeliharaan kendaraan dinas sebaiknya dilakukan melalui pengadaan langsung dalam rangka meningkatkan efisiensi proses dan biaya transaksi pemeliharaan kendaraan dinas.

## **2) Analisis Efektivitas Biaya Transaksi Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas**

Efektivitas biaya adalah tingkat penggunaan anggaran berdasarkan penggunaannya yang tepat dalam rangka pengadaan alat tulis kantor (ATK). Dari data dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pengadaan ATK pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku menunjukkan bahwa semua anggaran pengadaan ATK pada tahun 2011 yang berjumlah Rp 154.281.000 habis dipakai untuk pengadaan ATK. Jadi tingkat penggunaan anggaran adalah 100 %. Ini menunjukkan bahwa efektivitas dari anggaran pengadaan ATK adalah 100 % jika ditinjau dari tingkat penggunaan anggaran.

Semua biaya transaksi yang dikeluarkan diperuntukkan bagi kegiatan pengadaan ATK. Selain itu, dari hasil perbandingan kelebihan dan kekurangan proses pengadaan ATK melalui pemilihan penyedia barang dengan metode

penunjukan langsung dan pengadaan langsung menunjukkan bahwa jika dilakukan pengadaan langsung maka harga barang lebih murah sehingga dengan menggunakan anggaran yang ada lebih banyak barang yang bisa dibeli, kualitas barang yang dibeli bisa lebih baik, ketepatan waktu pengadaan barang lebih tepat dan lebih sesuai jenis barang yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa lebih efektif pengadaan langsung dari pada penunjukan langsung. Ini berarti efektivitas biaya transaksi pengadaan ATK selama ini masih bisa ditingkatkan dengan cara penunjukan langsung. Ini berarti biaya transaksi pengadaan ATK selama ini tidak efektif.

Sehubungan dengan itu, maka diharapkan dilakukan perubahan pemilihan penyedia barang ATK dari penunjukan langsung menjadi pengadaan langsung dalam rangka meningkatkan efektivitas.

Selanjutnya, berdasarkan laporan penggunaan dana untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku menunjukkan bahwa semua anggaran pemeliharaan kendaraan dinas pada tahun 2011 yang berjumlah Rp 277.795.000 habis dipakai untuk pemeliharaan kendaraan dinas. Jadi tingkat penggunaan anggaran adalah 100 %. Ini menunjukkan bahwa efektivitas dari anggaran pemeliharaan kendaraan dinas 100 % jika ditinjau dari tingkat penggunaan anggaran.

Menurut penulis bahwa pemeliharaan kendaraan dinas melalui lelang umum tidak efektif karena ada kondisi dimana kerusakan kendaraan tidak diduga sebelumnya sehingga perbaikannya tidak dapat dilelang. Demikian halnya penggantian oli kendaraan terkadang situasional. Dengan demikian dari waktu

perbaikan akan lebih cepat dilaksanakan jika menggunakan pengadaan langsung dari pada lelang. Demikian halnya ketersediaan kendaraan dinas yang layak pakai akan lebih tersedia jika menggunakan pengadaan langsung dari pada lelang umum.

Efektivitas dari biaya transaksi sangat penting dalam rangka memperlancar pekerjaan pegawai sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Gareth (2004: 77) bahwa pada prinsipnya teori biaya transaksi bertujuan untuk meminimalkan biaya dari kegiatan penyesuaian pelayanan untuk menghasilkan kegiatan yang efektif, efisien dan ekonomis. Pandangan Karel mempunyai korelasi yang erat dari apa yang dikemukakan oleh Gareth (2004: 90) yang menyatakan bahwa biaya transaksi adalah biaya yang berperan penting dalam menciptakan peluang organisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ini berarti esensi dari biaya dalam berbagai kegiatan pelayanan pembiayaan atau penganggaran berperan penting dalam memperlancar pencapaian suatu tujuan organisasi. Seperti halnya dalam pandangan Gareth (2004: 95) bahwa biaya transaksi dalam suatu organisasi dikelola dengan baik melalui tahapan efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pembiayaan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menilai bahwa biaya transaksi pemeliharaan kendaraan dinas pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku belum efektif. Sehubungan

Sehubungan dengan itu, maka diharapkan dilakukan perubahan pemilihan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas dari pelelangan

umum menjadi pengadaan langsung dalam rangka meningkatkan efektivitas biaya transaksi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, maka disusunlah kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Proses pengadaan dan pemeliharaan barang/jasa pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku terdiri atas:
  4. Proses pengadaan ATK sebagai berikut:
    - 1) Proses pemilihan penyedia jasa pengadaan ATK dengan cara penunjukan langsung terdiri atas undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen pengadaan; Pemasukan dokumen kualifikasi; Evaluasi kualifikasi; Pemberian penjelasan; Pemasukan dokumen penawaran; Evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; Penetapan pemenang; Pengumuman pemenang; Penunjukan penyedia barang/jasa.
    - 2) Pelaksanaan pengadaan ATK terdiri atas pejabat pengadaan barang melakukan pemeriksaan stok barang, menaksir kebutuhan barang, koordinasi dengan penyedia barang ATK, datangkan barang, pemeriksaan barang,

membuat daftar serah terima barang, pembayaran dan pengambilan bukti pembayaran.

- 3) Pelaporan pengadaan ATK terdiri atas penyusunan laporan, pengandaan laporan dan penyerahan laporan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas.
5. Proses pemeliharaan kendaraan dinas adalah sebagai berikut:
1. Proses pemilihan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang terdiri atas pengumuman prakualifikasi; pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; pembuktian kualifikasi; penetapan hasil kualifikasi; pengumuman hasil kualifikasi; sanggahan kualifikasi; undangan; pengambilan dokumen pemilihan; pemberian penjelasan; pemasukan dokumen penawaran tahap I; Pembukaan dokumen penawaran tahap I; evaluasi dokumen penawaran tahap I; penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; pemberitahuan/ pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I; pemasukan dokumen penawaran tahap II; pembukaan dokumen penawaran tahap II; evaluasi dokumen penawaran tahap II; pembuatan berita acara hasil pelelangan; penetapan pemenang; pengumuman pemenang; sanggahan; sanggahan banding (apabila diperlukan); penunjukan penyedia barang/jasa.

2. Proses pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas yang terdiri atas pejabat pengadaan barang/jasa memeriksa kerusakan kendaraan dan menaksir biaya perbaikan; koordinasi dengan penyedia jasa perbaikan, pemeriksaan kendaraan; penentuan biaya dan kesepakatan harga; perbaikan/pemeliharaan kendaraan; melaksanakan perbaikan; evaluasi hasil perbaikan; pembayaran dan pengambilan bukti pembayaran lalu diserahkan ke pejabat pengadaan barang.
  3. Proses pelaporan pengadaan pemeliharaan kendaraan dinas terdiri atas penyusunan laporan, penggandaan laporan dan penyerahan laporan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas.
2. Proses pengadaan barang dan jasa ditinjau dari teori pendekatan teori *asymmetric information*, *opportunity behavior* dan *efficiency economic value* adalah mendukung proposisi penelitian yaitu semakin tinggi *asymmetric information* maka semakin rendah kualitas pelayanan organisasi kepada publik; Semakin tinggi *opportunity behavior*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik dan semakin tinggi *efficiency economic value*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik.

Proses pengadaan ATK melalui penunjukan langsung dan proses pemeliharaan kendaraan dinas melalui pelelangan umum adalah tidak efisien dan tidak efektif. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dapat dilakukan melalui penunjukan langsung penyedia barang/jasa.

### **E. Implikasi Hasil Penelitian**

Implikasi hasil penelitian ini dibagi atas 3 bagian yaitu implikasi teoritis, implikasi penelitian dan implikasi praktis.

#### **1. Implikasi Teoritis**

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Dalam proses transaksi pengadaan barang/jasa selalu ada komponen biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya operasional. Temuan penelitian ini sejalan dengan Nearly (2003: 251) bahwa kebutuhan pembiayaan merupakan hal yang prinsip di dalam menjaga kelangsungan hidup organisasi baik berupa biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya operasional, Matthew (2005: 45) menyatakan bahwa biaya transaksi berperan penting dalam meningkatkan penyesuaian pelayanan yang dilakukan pemerintah melalui penyediaan biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya operasional; Moey (1988: 321) menyatakan bahwa biaya pemerintah berperan penting dalam kegiatan layanan. Biaya transaksi terdiri atas biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya

operasional memberi kontribusi dalam biaya pemerintah; Karel (2006: 103) menyatakan biaya transaksi pemerintah adalah kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ini berarti, keberadaan biaya transaksi dalam berbagai kegiatan pelayanan membutuhkan adanya aspek pembiayaan informasi, administrasi, operasional dan teknologi; Norman (2004: 59) memberikan suatu gambaran diagram tentang biaya transaksi pelayanan yang diterapkan dalam suatu organisasi. Sebuah asumsi bahwa biaya transaksi ditentukan oleh adanya hubungan yang saling berkorelasi antara biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya operasional yang digunakan untuk menciptakan adanya kelayakan atau kesesuaian biaya yang diterapkan dalam pelayanan dan Murdock (2005: 69) bahwa suatu tujuan organisasi akan terwujud bila pembiayaan transaksi pelayanan jelas terlihat diterapkan. Kejelasan biaya transaksi pelayanan terlihat dalam bingkai pelayanan apabila didukung empat dasar sudut pandang sisi biaya transaksi pelayanan berupa biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya operasional.

- b. *Asymmetric information* dapat menyebabkan pelayanan aparat kepada publik menjadi tidak baik. Temuan penelitian ini mendukung proposisi pertama dari penelitian ini yakni “semakin tinggi *asymmetric information* maka semakin rendah kualitas pelayanan organisasi kepada publik.” Temuan penelitian ini sejalan pula dengan teori *asymmetric information* sebagaimana diungkapkan oleh Tietz (2002: 121) bahwa teori *asymmetric information* sebagai kajian untuk melihat adanya hubungan

yang saling terkait antara permintaan pelayanan (*service demand*) dengan penawaran pelayanan (*service supply*) untuk menghasilkan keseimbangan (*equilibrium*) pelayanan yang menguntungkan antara pemerintah dan publik; Thaler (2003: 206) bahwa konsepsi teori *asymmetric information* merupakan suatu kegiatan secara langsung mengenai proses informasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik tanpa mengabaikan pentingnya informasi sebagai sebuah peluang untuk memenuhi kepuasan publik; Todd (2005: 223) adanya kepentingan dua belah pihak menimbulkan efek permintaan dan efek penawaran untuk menghasilkan keuntungan pembiayaan yang dapat digunakan secara operasional dalam pencapaian tujuan organisasi dan kepuasan publik.

- c. *Opportunity behavior* yang menunjukkan perilaku aparat pelayanan yang memanfaatkan peluang untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik akan berdampak pada tingginya kualitas pelayanan tersebut. Temuan penelitian ini mendukung proposisi kedua dari penelitian ini yakni “Semakin tinggi *opportunity behavior*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik”. Temuan penelitian ini sejalan pula dengan Webley (2005: 155) yang menyatakan keberhasilan suatu biaya transaksi dalam organisasi ditentukan dari perilaku birokrasi yang mencari peluang untuk memperoleh keuntungan; Traub (2000: 122) bahwa sebuah organisasi berupaya mengembangkan perilaku aparat di dalam menerapkan teori *opportunity behavior* sebagai

langkah kongkrit untuk memperbaiki pelayanan dalam menghasilkan biaya transaksi yang optimal dan Tietz (2002: 163) memformulasikan *opportunistic behavior* sama dengan *benefit optimization* (keuntungan optimal) dikurangi *minimization cost* (minimalisasi biaya) dengan rumus  $OB = BO - MC$  dimana:  $OB =$  *opportunistic behavior*,  $BO =$  *benefit optimization*,  $MC =$  *minimization cost*.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya perilaku aparat untuk meminimasi biaya transaksi. Hal ini kurang sejalan dengan teori *opportunity behavior* yang meminimalkan biaya transaksi.

- d. Aparat pelayanan melakukan efisiensi nilai ekonomi melalui perbaikan pelayanan akan menyebabkan peningkatan keuntungan bagi organisasi tersebut. Temuan penelitian ini mendukung proposisi ketiga dari penelitian ini yakni “Semakin tinggi *efficiency economic value*, maka semakin tinggi kualitas pelayanan organisasi kepada publik.” Temuan penelitian ini sejalan dengan Ritzer (2005: 215) menyatakan keuntungan suatu organisasi tergantung pada efisiensi nilai ekonomis yang digunakan untuk memprediksi besarnya keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan transaksi pelayanan; Viscusi (2003: 79) bahwa semakin banyak transaksi pelayanan yang terjadi dalam suatu organisasi semakin memberikan nilai tambah ekonomis bagi organisasi tersebut memperoleh keuntungan; Wittman (2004: 246) bahwa semakin banyak manfaat dari transaksi yang diterapkan, upaya minimalisasi biaya semakin besar nilai

ekonomis dilakukan oleh organisasi dan Birl (2003: 195) bahwa biaya transaksi yang tinggi dibarengi dengan pelayanan yang memuaskan menjadi nilai tambah bagi organisasi untuk maju dan berkembang.

## **2. Implikasi Metodologi**

Pengadaan barang/jasa pada Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku cukup banyak, namun dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pengadaan barang ATK dan jasa pemeliharaan kendaraan dinas. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan penelitian ini dengan melakukan penelitian biaya transaksi pengadaan barang/jasa yang lainnya. Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang sama pada instansi pemerintah yang lain selain Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku bahkan pada perusahaan swasta. Pengembangan penelitian tersebut akan lebih melengkapi dan memperkaya hasil penelitian tentang biaya transaksi.

## **3. Implikasi Praktis**

- a. Memperhatikan proses pengadaan ATK melalui metode penunjukan langsung penyedia barang adalah lebih panjang dari pada pengadaan langsung. Selain itu metode penunjukan langsung penyedia barang ATK tidak efisien dan tidak efektif. Untuk itu diharapkan kepada penentu kebijakan agar merubah

metode penunjukan langsung menjadi pengadaan langsung dalam pemilihan penyedia barang ATK

- b. Memperhatikan proses pemeliharaan kendaraan dinas melalui metode pelelangan umum penyedia barang/jasa adalah lebih panjang dari pada pengadaan langsung. Selain itu metode pelelangan umum penyedia barang/jasa pemeliharaan kendaraan dinas tidak efisien dan tidak efektif. Untuk itu diharapkan kepada penentu kebijakan agar merubah metode pelelangan umum menjadi pengadaan langsung dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemeliharaan kendaraan dinas.
- c. Metode pemilihan penyedia barang/jasa ditempuh untuk meminimasi proses dan biaya transaksi serta hasil pengadaan barang/jasa yang lebih baik dibanding penunjukan langsung atau pelelangan umum. Perubahan tersebut tidak boleh dilakukan untuk menghindari pajak dan mencari keuntungan pribadi, akan tetapi demi penyederhanaan proses, peningkatan efisiensi dan efektivitas biaya transaksi.
- d. Kepala, sekretaris dan staf pendukung dalam panitia pengadaan alat tulis kantor (ATK) dijadikan 1 orang saja dalam rangka efisiensi, demikian halnya pemeliharaan kendaraan dinas cukup 1 orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis pemeliharaan kendaraan (mobil dan motor).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2010. *Kewirausahaan*. Alfa Beta, Bandung
- Angraini, Eva. 2005. Analisis Biaya Transaksi dan penerimaan nelayan dan petani di Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi. *Tesis IPB*, Bogor
- Albrow, Martin, 1989. *Birokrasi*. Terjemahan. Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Alonso, Malic, 2009. *How to Managed of Organization Effectiveness*. New Jersey, Prentice Hall
- Ansari, Muhammad Sadiq, 2006, An Empirical Investigation of Cost Efficiency in the Banking Sector of Pakistan. *SBP Working Paper Series No.12 June 2006*, State Bank Of Pakistan, Karachi.
- Anshari, Haninpraja, 2003. *Penerapan Efisiensi Pelayanan Prima*. Penerbit Boedi Ilmu, Malang.
- Anshory, Amir, 2005. *Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashilah, Zahrani, 2003. *Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Kepuasan Masyarakat*. Penerbit Bina Harapan Ilmu, Surabaya.
- Boeyong, Soetanto, 2001. *Standar Pelayanan Minimal: Tinjauan Ekonomis dalam Keterjangkauan Biaya Pelayanan*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Birl, Higgins, 2003. *Public Service and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press.
- Black, Shafritz, 2007. *Classics of Public Administration*, USA: Harcourt Brace & Company
- Bromley, Daniel W. 1982. Land and Water Problems: An Institutional Perspective. *American Journal of Agricultural Economics* 64: 834-44.
- Carlos, Samuelson, 2006. *The Network Service of Public*. Published by Prentice Hall Ohio Press
- Demmand, Knoke, 2006. *Altematif of Public Service*. London: Sage Publication.
- Dilulio, Ussell, 1991. *Administration Management*, Mc Grow-Hill, inc., Singapura
- Engel, James, 1990. *Satisfaction; A Behavioral Perspective On The Consumer*. Mc-Graw Hill Companies Inc., USA. (Diterjemahkan oleh Purwoko).
- Frederickson, H. George, 1997. *Public Administration Theory Primer*. Kumarin Press, New York.

- Gareth R, Jones, 2004. *Management Organization*. Prentice Hall, Ohio University.
- Gaspersz, V. 2004. *Manajemen Kualitas: Penerapan Konsep-konsep Kualitas dalam Manajemen Bisnis Total*. Kerjasama Yayasan Indonesia Emas Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Genugten, Maria Lambetta Van. 2008. *Transaction Cost Economics and The Provision of Public Services at The Local Level*
- Gibson, Ivancevich Donnelly, 1997. *Organisasi: Perilaku Struktur Proses*. Edisi Revisi, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Gopar, Achmad H. 2010. Analisis Biaya Transaksi Pada Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta*. Volume V Agustus 2010
- Gronroos, Michael, 1990. *Perceived Service Quality Model*. Published Ohio University Press, California.
- Guricci, Guntur, 2002. *Pentingnya Ketepatan Waktu dalam Pelayanan Kerja*. Penerbit Sinar Ilmu, Bandung
- Hellriegel, Thomas G, 1998. *Perspectives Service on Devolution*, APA Journal AUTUMN.
- HG. Surie, 1987. *Ilmu Administrasi Negara: Suatu Bacaan*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Huber, Marcel, 2007. *Service Autonomy in Concept and Theory*. Published by American Press, USA.
- Huckman, Morgan, 2008. *Organization Theory, A Macro Perspective for management*, Prentice-Hall, New York.
- Harrison, William, 2008. Service Transaction Cost in Government, dalam *Journal Bureucracy*, Vol. 4(3), 2008: 12-16
- Herlind, Harold, 2006. *Power and Society of Public Administration*. Singapore: Singapore Press Holding
- Ilham, Thamrin, 2005. *Keadilan yang Merata dan Tanpa Diskriminan dalam Pelayanan Organisasi Kerja*. Penerbit Pustakajaya, Jakarta.
- Jabra, J.G. and Dwivedi, O.P., 1989. *Public Service Accountability Connected*. Kumarin Press Inc, New York.
- Jessy, Corazon, 2008. Added Value in Government Bureacracy Cost Service, dalam *Journal State Budget*, Vol. 2(1), 2008: 8-9
- Karel, Lann, 2006. *Theories of Organizations: Form, Process and Transformation in Empowerment of Community*. A Wiley International Publ., New York.

- Kats, M. Saul and Rozenweig, 1982. *Modernisasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional: Suatu Arahan Praktis*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Keban, Y.T., 2004. *Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Rajawali Press, Jakarta.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum
- Klein, Howard J. and Jay S. Kim, 2000. A Field Study of the Influence of Situational Constraints, Leader-Member Exchange, and Goal Commitment on Performance: *Academy of Management Journal*, Vol. 41, No. 1 (85-95).
- Kristiadi, JB, 1994. *Administrasi Manajemen Pembangunan*. Penerbit LAN, Jakarta.
- Lamdant, WG. Guci, 2007. *Network Service Management*, John Wiley and Sons, California.
- Leonardo, Macraully, 2008. *Organization Theory in Public Administration*. New York, John Wiley and Sons
- Mahadarma. 2012. *Asimetrik-informasi-HAM-kebebasan-berpendapat-bagi-kelompok-marjinal*. <http://mahadarmaworld.wordpress.com>. Diakses 25 Januari 2013
- Marasabessy A. Z. 2011. Analisis Biaya Transaksi (Transaction Cost) Pengelolaan sumberdaya perikanan (Studi Kasus: Kecamatan Leihitu). Kabupaten Maluku Tengah
- Marcel, Davidson, 2003. *Service Quality in Concept and Theory*. Published by American Press, New York.
- Matthews, Jorgy, 2005. *The Structure of Unstructured Decision Processed*. Prentice Hall, Ohio University.
- Moenir. 2003. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Murdock, James P., 2005. *Public Policy: An Evolution Administration Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Nasution. S. 1992. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, CV. Tarsito, Bandung
- Natsir, Muh., 2004. *Penerapan Sistem Pelayanan Minimal*. Penerbit Aditya Buana Ilmu, Bandung.
- Nearly, Jeremy, 2003. *Economic Transaction of Development: Empirical Investigation of Farm*. Hasper and Row
- Norman, Davis, 2004. *Service Management System*. Prentice Hall Ohio University Press, USA.

- Nurdin, Djalil, 2003. *Pentingnya Ketepatan Waktu dalam Pelayanan Prima*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Osborne, David Plastrik and Peter. 1997. *Memangkas Birokrasi*. Penerbit PPM, Jakarta.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted. 2000. *Mewirusahaakan Birokrasi*. Penerbit PPM, Jakarta.
- Padje, dkk. 2006. *Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik*. <http://id.wikipedia.org/wiki/pelayananpublik>. Akses tanggal 1 Oktober 2009.
- Parasuraman, A. Valerie, 2001. *Delivering Quality Service*. (Diterjemahkan oleh Sutanto). The Free Press, New York.
- Pasolong, H. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan Pertama. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Pesch, James, 2005. *Implementation of Service Administration Public*. London: Sage
- Peraturan Gubernur Maluku Nomor 56 Tahun 2009 tentang uraian tugas Sekretariat Daerah Provinsi Maluku
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peter, J.H., 2003. *Service Management in Managing The Image*. Trisakti University, Jakarta.
- Pusat Jaminan Mutu. 2012. *Manual Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeliharaan Aset*. Universitas Brawijaya, Malang
- Rakhmat, 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Penerbit Pustaka Arief, Tangerang-Banten.
- Rangkuti, Freddy, 2004. *Konsep Pengukuran Kepuasan Pasien*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ritzer, George, Gullbart, Michael, 2005. *Development of Organization Management*. Englewood Cliffs: N.J: Prentice Hall
- Rivai, Veithzal, 2005. *Kiat Kepemimpinan Administrasi di Abad 21*. Penerbit Murai Kencana, Jakarta.
- Rizal, Syamsurya, 2004. *Transparansi Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Robert H, 2000. *Public Administration: Understanding Management*. Published McGraw Hill, New York.
- Roberts, Edward B, 2002, *Innovation – Driving Product, Process and Market Change*, MIT, Cambridge

- Rondinelli, Dennis A. 1981. *Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience*. World Bank Staff Working Papers. Washington DC.
- Ruiter, Milton, 2008. *The Element of Administration Development*, Ithaca: Cornell University Press.
- Salim, Agus, 2001. *Bangunan teori: Metodologi penelitian untuk bidang sosial, psikologi dan pendidika*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Samuelson, Jeniston, 2000. *Application of Quality Service Theory*. Published by John Wiley and Sons, USA.
- Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. Cetakan Pertama. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sasongko, Hermanto, 2006. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Penyunting: Darwin Muhadjir). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sastrohadiwiryono, B. Siswanto. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Setiyono, 2005. *Perilaku Administrasi dalam Pelayanan Publik*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Shah, Haryono, 1987. *Patologi Administrasi Publik dan Birokrasi*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Silalahi, Ulbert, 1999. *Studi tentang Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Penerbit Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Hart, Silberd, 2007. *Transaction Cost as Barometer Measure of Service Quality in Georgia Regional America*, dalam *Journal Diplomat*, Vol. 2(1), 2007: 1-2
- Simon, S. 1999. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Pelayanan*. Penerbit Gava Media, Jakarta.
- Sinambela, Soemandar, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Spears, Larry, 2004. *Identification of Service Quality in Public Service Management*. <http://id.wikipedia.org/wiki/pelayananpublik>. Akses tanggal 1 Oktober 2009.

- Stemma, Patrick, 2007. *Transaction Theory in Organization Environment*. State University of New York Press, Albany
- Steenge, Jerry, 2008. *The Activity of Government Bureacracy*. Published by Sage Production, USA
- Stephen, Robbert, 2005. *The Concept and Theory of Cost*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey.
- Stemvelt, Robert C., 2004. *Perception of Service Quality*. (Diterjemahkan oleh Purwoko). Allyn and Bacon, Massachusetts.
- Supriyono. 2000. *Akuntansi Biaya*, Buku 1, edisi dua. BPFE, Yogyakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teulings, Marshall, 2003. *The Reformation of Administration Bureacracy System*. Published by Thompson Learning Press, USA
- Thaler, Hudson, 2003. *Comparison of Administration Theories*. Journal of Public Administration, Vol. 45 No. 4.
- Tietz, 2002. *Development Management and Planning*. Publishing by Economic Cooperation and Development.
- Tjiptono, Fandy, 2003. *Kepuasan Pasien dalam Pelayanan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2004. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Penerbit Haji Mas Agung, Jakarta.
- Tood, Lebey, 2005. *Analysis and Approach of Strategy*. Manchester University Press, Manchester
- Viscusi, WK, 2003. *The Planning and Development Public Policy*, New York, Oxford University Press.
- Waarden, Van Burd, 2006. *Bureacracy Administration: Theory and Practice*. Published by John Wiley and Sons, California
- Waldo, Widodo, 1991. *Manajemen Administrasi: Suatu Pengantar*. Penerbit Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Walters, D, 1994. *The Administration and Problem Scope*. New York: Free Press.
- Webley, P. 2005. *The Impact of Policy Public*. Edward Elgar Published, New Jersey.
- Westra, Wasistiono, 1999. *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*, Citra Pindo, Bandung.
- Wibisono, Agus. 2010. *Efektif dan Efisien*. <http://aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisien/>. Diakses 20 Januari 2013

- Williamson, Olivier E. 1996. The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes. *Journal of Economic Literature* 19: 1537-568.
- Winardi, J., 2004. *Administrasi dan Management Organisasi*. Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Wittman, DA, 2004. *Application of Public Service in Good Governance*. Published by John Wiley and Sons, New York.
- Yates, Crozier, 2001. *The Administration Phenomenon*. London: Tavistock
- Yoga, Nyoman, 2003. *Aktivitas Pelayanan yang Berkualitas*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Yong, C.Z., Yun, Y.W., Loh, L. 2003. *The Quest for Global Quality*. (Diterjemahkan oleh Sutanto). Pustaka Delapratasa, Jakarta.
- Zauhar, Mansyur, 1999. *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*. Penerbit Rangkang Education, Yog
- Zeithaml, et. al. 1990. *Delivering Quality Service*. (Diterjemahkan oleh Sutanto). The Free Press, New York.
- Zulkifli, Anwar, 2002. *Efisiensi Waktu dalam Kinerja Pelayanan*. Penerbit Eka Persada Ilmu, Jakarta.



**Lampiran 2**

Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2011

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>LOKASI</b>	<b>Jumlah</b>
Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
- Penyediaan jasa surat menyurat	Ambon	40.980.000
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Ambon	290.640.000
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ambon	42.843.000
- Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Ambon	154.281.000
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Ambon	195.567.000
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ambon	15.994.000
- Penyediaan makanan dan minuman		
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Ambon Jakarta	58.800.000 253.320.000
<b>Jumlah anggaran</b>		<b>1.052.425.00</b>
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Ambon	350.000.000
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Ambon	277.795.000
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana umum daerah	Ambon	158.490.000
<b>Jumlah anggaran</b>		<b>786.285.000</b>

Sumber: Biro Keuangan dan Kekayaan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku

# **PEDOMAN WAWANCARA 1**

**DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANALISIS  
BIAYA TRANSAKSI PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR  
(ATK) PADA BIRO KEUANGAN DAN KEKAYAAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU:**

**PETUNJUK:**

Dalam rangka penyelesaian studi kami pada program Pascasarjana S3 Administrasi Publik Universitas Hasanuddin, maka kami menyusun tugas akhir dengan judul “ANALISIS BIAYA TRANSAKSI PADA BIRO KEUANGAN DAN KEKAYAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU”. Sehubungan dengan itu, maka kami membutuhkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan kami dan memberikan informasi lainnya yang berhubungan dengan biaya transaksi yang terdiri atas biaya informasi, biaya teknologi, biaya administrasi dan biaya operasional dalam rangka transaksi penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas pada tahun 2010 dan 2011.

**DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANALISIS BIAYA TRANSAKSI PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) PADA BIRO KEUANGAN DAN KEKAYAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU:****Definisi:**

Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK). Biaya ini terdiri atas:

1. Biaya informasi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan informasi pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK)
2. Biaya teknologi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai sarana teknologi yang digunakan pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK).

3. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan pencatatan dan dokumen pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK).
4. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan operasional kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK)

Untuk pertanyaan dengan beberapa alternatif jawaban, pilihlah satu atau lebih alternatif jawaban. Untuk pertanyaan terbuka, berilah jawaban/uraian.

Fokus penyediaan alat tulis kantor (ATK) pada tahun: a. 2010      b. 2011

Nama Informan      : . . . . .

Jabatan      : . . . . .

1. Penyediaan alat tulis kantor (ATK) melalui:
  - a. Tender
  - b. Penunjukan
  - c. Pembelian langsung
2. Kegiatan apa yang dilakukan dalam penyediaan ATK
  - a. Rapat
  - b. Koordinasi
  - c. Penyusunan rencana pengadaan ATK
  - d. Penetapan pengadaan ATK
  - e. Pengadaan ATK
  - f. Administrasi pengadaan ATK
  - g. Lainnya sebutkan . . . . .
3. Uraikan sistem prosedur penyediaan alat tulis kantor (ATK) . . . . .  
 . . . . .

4. Informasi apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK)
  - a. Jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan
  - b. Rekanan (Supplier)
  - c. Toko penjual ATK
  - d. Harga barang ATK
  - e. Lainnya sebutkan .....
  
5. Alat teknologi apa saja yang digunakan dalam kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK):
  - a. Komputer
  - b. Laptop
  - c. LCD
  - d. Hand phone (HP)
  - e. Telepon kantor
  - f. Lainnya sebutkan .....
  
6. Bahan apa saja yang digunakan dalam kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK):
  - a. Kertas
  - b. Pulpen
  - c. Pensil
  - d. Tinta
  - e. Buku
  - f. Lainnya sebutkan .....

7. Berikan justifikasi biaya informasi untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK):

No	Jenis Biaya Informasi	Jumlah biaya (Rp)
1	Biaya pulsa telepon HP selama . . . . . jam	
2	Biaya pulsa telepon kantor selama . . . . jam	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

8. Berikan justifikasi biaya teknologi untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK):

No	Jenis Biaya Teknologi	Jumlah biaya (Rp)
1	Komputer digunakan selama . . . . hari	
2	Hand phone digunakan selama . . . . jam	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

9. Berikan justifikasi biaya administrasi untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK):

No	Jenis Biaya Administrasi	Jumlah biaya (Rp)
1	Kertas A4/Kuarto/Folio . . . . rim	
2	Pulpen . . . buah	
3	Pensil . . . . buah	
4	Tinta . . . . . buah	
5	Buku . . . . . buah	
6		
7		
8		
9		
10		

10. Berikan justifikasi biaya operasional untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK):

No	Jenis Biaya Operasional	Jumlah biaya (Rp)
1	Honorarium panitia . . . . . orang	
2	Konsumsi panitia/rapat/pegawai . . . kali . . . orang	
3	Transportasi mobil . . . kali	
4	Transportasi motor . . . . kali	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

